

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Kota Atambua

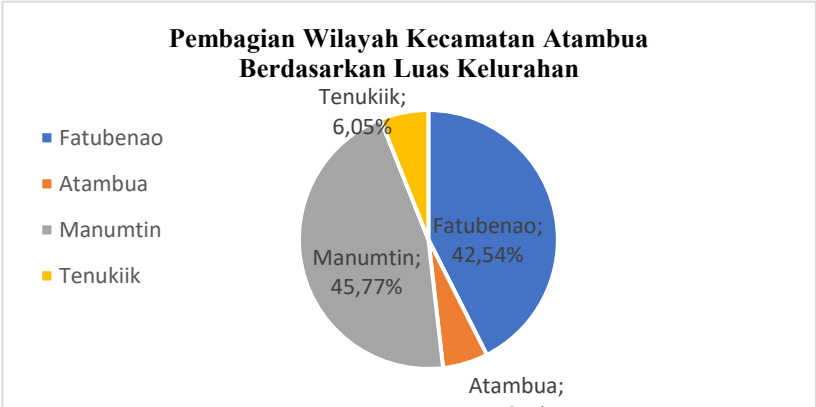
Kota Atambua merupakan ibu kota Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi salah satu kawasan strategis nasional yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Secara geografis, Atambua berada di bagian timur Pulau Timor, dan memiliki peran vital sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, serta gerbang utama arus lalu lintas orang dan barang antarnegara di kawasan perbatasan. Kota ini memiliki peranan penting dalam lalu lintas perdagangan lintas negara serta menjadi penghubung utama dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi antarwilayah. Wilayah Kota Atambua berada pada ketinggian 400–500 meter di atas permukaan laut dengan kondisi wilayah berbukit dan beriklim tropis kering.

Luas wilayah Kota Atambua mencapai 24,8 km², yang terbagi menjadi 4 kelurahan yaitu yaitu Fatubenao, Atambua, Manumuti dan Tenukiik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, 2024).

Tabel 4. 1 Luas Kelurahan di Kecamatan Atambua

Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase luas terhadap luas
		kecamatan
Fatubenao	10,55	42,54
Atambua	1,40	5,65
Manumtin	11,35	45,77
Tenukiik	1,50	6,05
Total	24,8	100,00

Sumber : Kecamatan Atambua Dalam Angka 2024



Grafik 4. 1 Pembagian Willayah Kecamatan Atambua

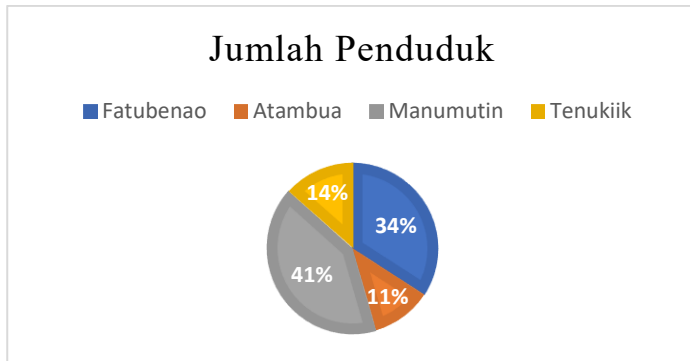
Pada grafik di atas diketahui bahwa Kelurahan Manumutin memiliki jumlah penduduk paling banyak sehingga luas kelurahannya paling besar dengan total 45,77% dari total luas wilayah di Kecamatan Atambua, dan untuk kelurahan yang paling kecil yaitu Atambua dengan total luas 5,65% dari total luas wilayah di Kecamatan Atambua.

Jumlah penduduk di Kota Atambua tercatat sebanyak 30.071 jiwa pada tahun 2024, berikut merupakan jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Kota Atambua.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Atambua 2024

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Fatubenao	10.276
Atambua	3.412
Manumutin	12.352
Tenukiik	4.031
Total	30.071

Sumber : Kecamatan Atambua Dalam Angka 2024



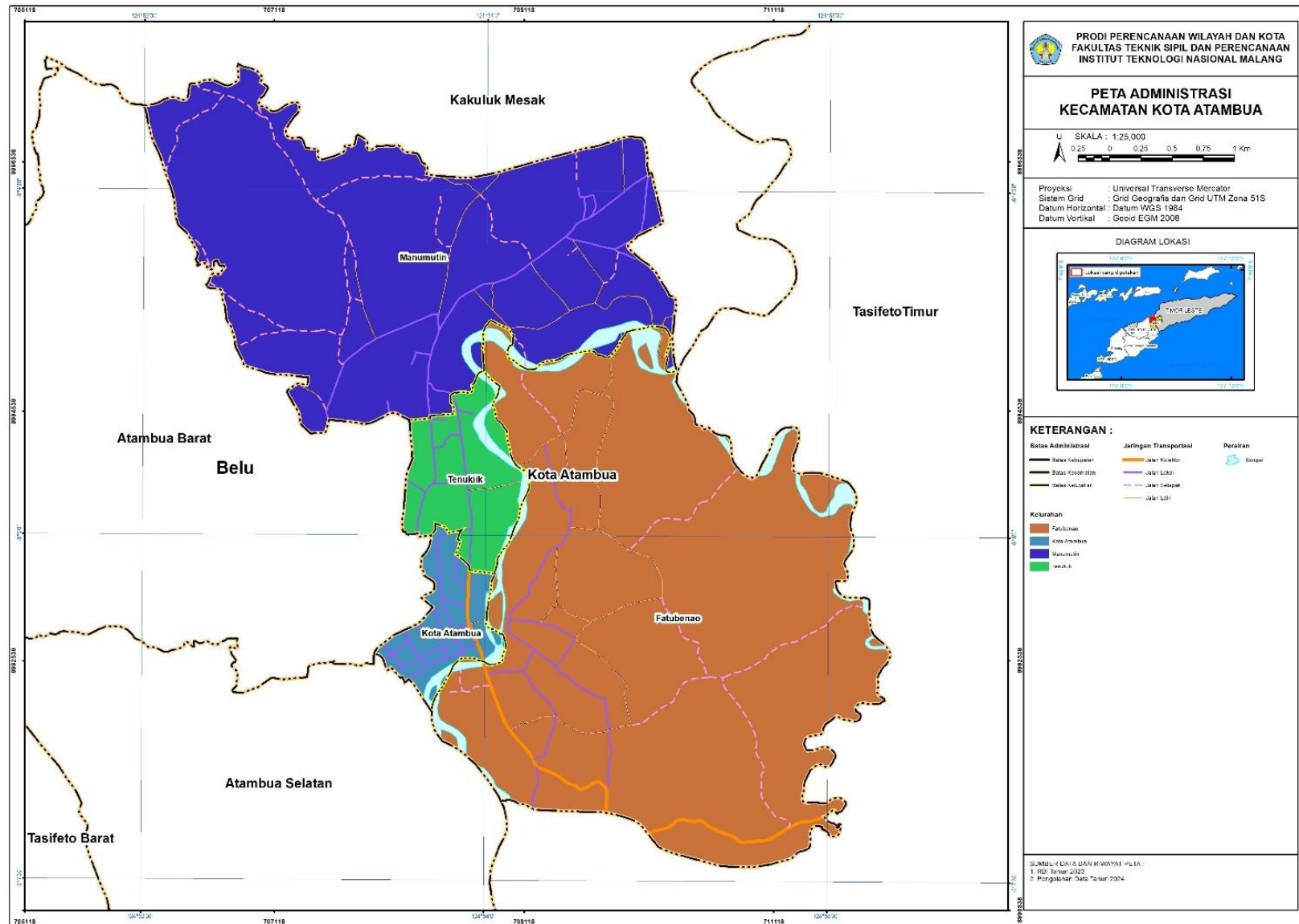
Grafik 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Atambua

Berdasarkan data pada diagram lingkaran, diketahui proporsi jumlah penduduk dari empat kelurahan yang berada di wilayah pengamatan, yaitu Fatubenao, Atambua, Manumutin, dan Tenukiik. Persentase sebaran penduduk ditunjukkan bahwa Manumutin memiliki proporsi penduduk terbesar, yaitu sebesar 41% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Manumutin merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya, Fatubenao menempati urutan kedua dengan proporsi sebesar 34%, juga menunjukkan jumlah penduduk yang cukup besar dan signifikan terhadap total keseluruhan, Tenukiik menyumbang sebesar 14% dari total penduduk. Meskipun tidak sebesar dua wilayah sebelumnya, wilayah ini tetap memberikan kontribusi sedang terhadap jumlah penduduk keseluruhan, dan Atambua memiliki proporsi penduduk paling kecil, yaitu 11%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Atambua merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara keempat wilayah.

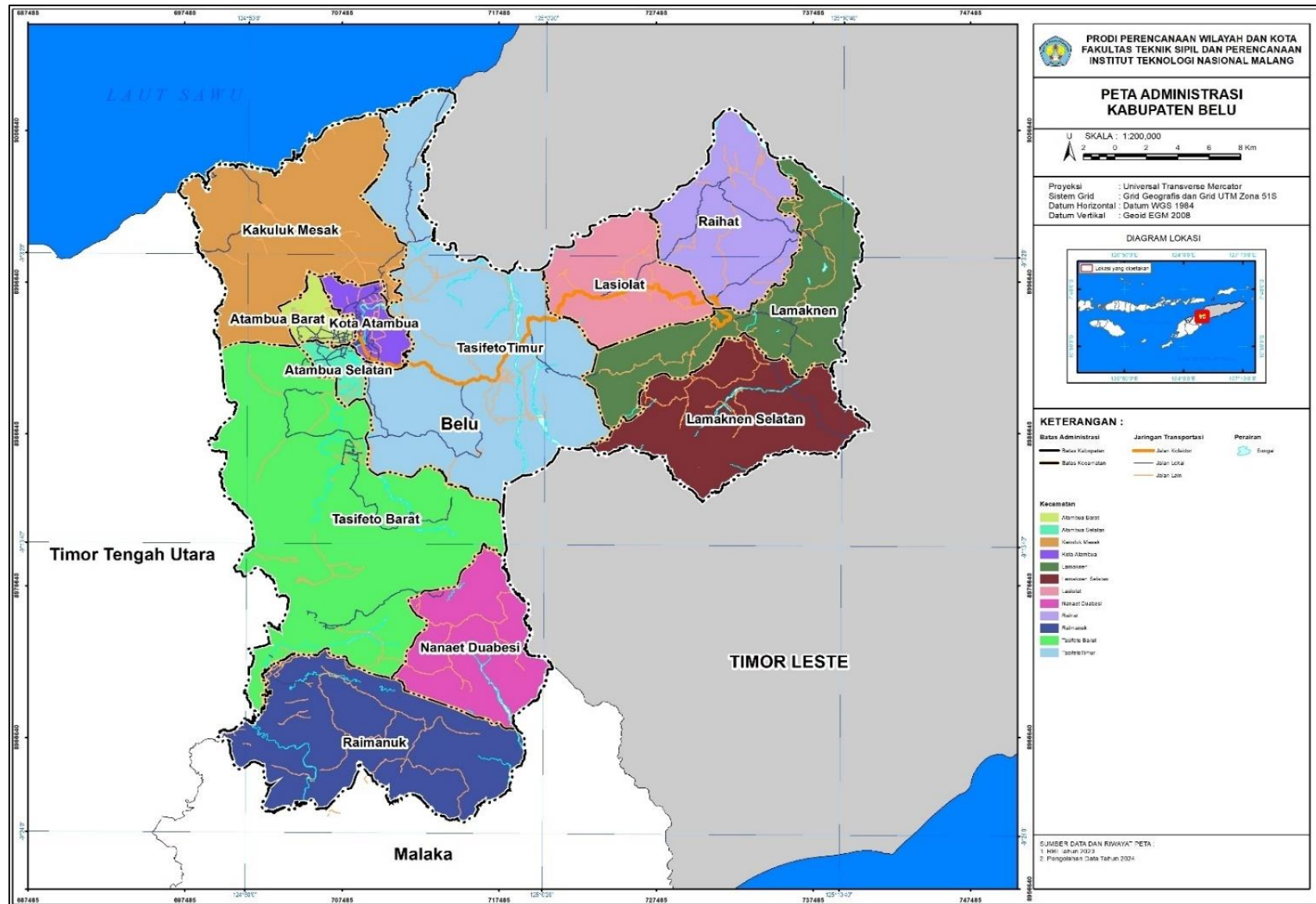
Secara administratif, Kota Atambua dikelilingi oleh beberapa kecamatan yang turut berkontribusi terhadap dinamika wilayah secara keseluruhan. Pengetahuan mengenai batas-batas ini tidak hanya menggambarkan kondisi spasial Kota Atambua, tetapi juga menjadi dasar dalam menganalisis potensi hubungan antarwilayah, distribusi penduduk, serta pelayanan publik lintas kawasan.

Sebelah Utara	:	Kecamatan Tasifeto Timur
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Atambua Selatan
Sebelah Barat	:	Kecamatan Atambua Barat
Sebelah Timur	:	Kecamatan Tasifeto Timur

Dengan memahami batas-batas tersebut, dapat dilakukan identifikasi wilayah yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan Kota Atambua, baik dari segi mobilitas penduduk, pergerakan barang, hingga potensi kerja sama antarwilayah.



Peta 4. 1 Administrasi Kecamatan Kota Atambua



Peta 4. 2 Administrasi Kabupaten Belu

4.2 Kota Atambua sebagai PKSN

Kota Atambua yang terletak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, memiliki posisi strategis sebagai kota perbatasan dengan Timor Leste. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menjadikan Atambua sebagai simpul penting perdagangan dan mobilitas antarnegara. Penetapan Atambua sebagai PKSN bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Penetapan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) didasarkan pada peran sentralnya dalam memperkuat integrasi nasional, mendukung pembangunan kawasan perbatasan, serta mendorong aktivitas ekonomi yang bersifat lintas batas. PKSN merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) yang bertujuan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan negara. Sebagai PKSN, Atambua diperoyeksikan menjadi simpul pengembangan kawasan timur yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, memperkuat ketahanan nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan juga memegang peranan strategis dalam upaya pemerataan pembangunan nasional, penguatan kedaulatan wilayah perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur lainnya. Kawasan ini juga berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial, perdagangan, dan distribusi logistik bagi masyarakat perbatasan. Dalam konteks hubungan luar negeri, Atambua memainkan peran penting dalam diplomasi ekonomi dan sosial dengan negara tetangga, terutama melalui jalur perdagangan dan mobilitas penduduk.

Atambua sebagai PKSN memiliki banyak potensi sumber daya terutama di sektor pertanian dan peternakan, kerajinan tangan seperti kain tenun dan tali rambi, serta potensi pariwisata budaya dan alam. Namun pemanfaatan potensi ini belum maksimal sehingga manfaat ekonomi belum optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional di kawasan perbatasan RI-Timor Leste melalui Atambua menunjukkan peningkatan yang signifikan. Misalnya, data ekspor dari Atambua ke Timor Leste naik sebesar 39% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, didorong oleh UMKM yang semakin berkembang. Kontribusi perekonomian utama Kabupaten Belu (termasuk Atambua) masih berasal dari sektor pertanian, jasa, perdagangan, hotel, dan restoran. Namun, metode tradisional dalam pengolahan hasil pertanian dan peternakan masih menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan yang signifikan. Pengembangan sektor ini sangat potensial jika didukung pelatihan dan teknologi yang lebih modern. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu (2020-2040) menetapkan Atambua sebagai pusat pengembangan ekonomi dan kawasan strategis PKSN, menekankan fokus pengembangan kawasan ini sebagai pusat distribusi dan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah PKSN Atambua telah memberikan kontribusi

nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah terutama melalui pengembangan sektor perdagangan lintas batas, pertanian, peternakan, dan UMKM. Namun potensi yang besar belum sepenuhnya tergarap maksimal karena masih adanya tantangan dalam pengelolaan, infrastruktur, dan modernisasi sektor ekonomi lokal. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut diharapkan semakin meningkatkan peran PKSN dalam pertumbuhan ekonomi Atambua dan sekitarnya ke depan.

4.3 Potensi dan Masalah

Kecamatan Kota Atambua memiliki berbagai potensi strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Salah satu potensi utama adalah letaknya yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan berdekatan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Posisi ini menjadikan Atambua sebagai pintu gerbang perdagangan dan mobilitas antarnegara yang penting di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, Atambua juga berperan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Belu, sehingga memiliki infrastruktur dasar, pusat pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi yang relatif lebih maju dibandingkan kecamatan lain.

Namun di balik potensi tersebut, Kecamatan Kota Atambua juga menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil wawancara bersama pegawai di Dinas perdagangan dan perindustrian yaitu, sumber daya manusia di Kecamatan Atambua masih kurang karena kurangnya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat serta keterbatasan koordinasi antar lembaga pemerintah. Kemudian juga dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi menimbulkan tekanan terhadap tata ruang kota, seperti munculnya permukiman kumuh, dan juga meskipun tergolong kota kecil namun terjadi kemacetan lalu lintas.

Dengan demikian, meskipun Kecamatan Kota Atambua memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan integrasi kawasan perbatasan, berbagai permasalahan struktural, sosial, dan kelembagaan masih menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Diperlukan strategi pembangunan yang terintegrasi dan partisipatif dengan pendekatan wilayah berbasis potensi lokal, penguatan kelembagaan, serta sinergi lintas sektor. Optimalisasi peran Atambua sebagai PKSN harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan konektivitas dan perdagangan lintas batas, tetapi juga pada pemerataan pembangunan antar wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Kota Atambua

Kecamatan Kota Atambua adalah pusat dari berbagai kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Letaknya yang strategis di daerah perbatasan dengan Timor Leste membuat daerah ini menjadi jalur penting untuk perdagangan antarnegara. Atambua, sebagai

sebuah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Penetapan Atambua sebagai PKSN tidak sekadar menempatkannya sebagai lokasi fisik, namun juga sebagai titik sentral yang berfungsi mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, Atambua memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah dan mitra terkait berusaha memperkuat ekonomi lokal dengan memberi akses bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam jaringan perdagangan perbatasan yang lebih luas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik sehingga masyarakat memiliki daya saing serta kualitas hidup yang terus meningkat. Tak kalah penting, hubungan sosial budaya yang erat antara penduduk Atambua dan Timor Leste membangun iklim yang kondusif dalam interaksi lintas batas yang produktif.

Secara infrastruktur sosial, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menjadi tulang punggung akses formal mempermudah mobilitas orang dan barang. PLBN tidak hanya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan secara administratif tetapi juga membantu menekan aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan sosial dan ekonomi kawasan ini. Di bidang ekonomi, Atambua berfungsi sebagai pusat distribusi dan perdagangan utama yang menggerakkan roda perekonomian daerah perbatasan. Letaknya yang strategis sebagai gerbang pintu antara Indonesia dan Timor Leste menjadikan Atambua sebagai sentra aktifitas perdagangan lintas batas. Pengembangan infrastruktur berupa akses jalan, fasilitas perbatasan, dan sarana transportasi juga memperlancar alur distribusi barang dan jasa sehingga semakin membuka peluang investasi baru yang berimbas positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Sektor-sektor produktif yang menopang perekonomian Atambua seperti pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, dan industri kecil mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, meskipun potensinya besar, tantangan seperti modernisasi metode produksi, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, dan peningkatan kualitas infrastruktur masih menjadi fokus utama agar dampak ekonomi dapat lebih optimal di masa mendatang.

Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan menunjukkan tren positif dalam aspek ekonomi, menandakan kemajuan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah. Namun, keinginan ini juga menuntut perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan, tata kelola, serta pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, aspek sosial dan ekonomi di Atambua saling berkaitan erat dalam membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan perbatasan. Upaya terkoordinasi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan penguatan perekonomian lokal diharapkan akan semakin mengukuhkan posisi Atambua sebagai PKSN yang mampu menggerakkan kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Perekonomian masyarakat di Kota Atambua, masih bergantung pada aktivitas perdagangan lintas batas negara. Indonesia sendiri menjadi pemasok utama sejumlah kebutuhan pokok dan barang konsumsi untuk RDTL. Namun aktivitas perdagangan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. Berdasarkan data BPS dan instansi daerah, kondisi ekonomi masyarakat Atambua menunjukkan adanya ketergantungan pada sektor jasa, perdagangan, dan pertanian. PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten (harga berlaku), menunjukkan bahwa perdagangan dan jasa memiliki angka yang cukup tinggi. Meskipun data khusus untuk Kecamatan Kota Atambua belum dipisahkan, diperkirakan bahwa kontribusi dari kecamatan ini cukup besar karena banyaknya aktivitas ekonomi yang terjadi. Terdapat tantangan dalam hal pemerataan infrastruktur, keterbatasan investasi, dan rendahnya nilai tambah produk lokal.

Tabel 4. 3 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 994.951,60	Rp 10.314.128,00	Rp 11.364.994,00	Rp 12.250.760,00	Rp 12.987.321,00
B, Pertambangan dan Penggalan	Rp 916.473,00	Rp 945.260,00	Rp 996.548,00	Rp 1.050.050,00	Rp 1.092.906,00
C, Industri Pengolahan	Rp 494.537,00	Rp 50.589,00	Rp 563.977,00	Rp 662.518,00	Rp 812.917,00
D, Pengadaan Listrik dan Gas Electricity & Gas	Rp 3.151,90	Rp 33.712,00	Rp 36.151,00	Rp 41.336,00	Rp 42.997,00
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp 1.088,80	Rp 1.217,80	Rp 13.151,00	Rp 13.618,00	Rp 13.851,00
F, Konstruksi	Rp 3.815.396,00	Rp 4.093.593,00	Rp 4.338.248,00	Rp 4.914.091,00	Rp 5.062.279,00
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 6.274.238,00	Rp 6.716.353,00	Rp 7.426.222,00	Rp 8.395.541,00	Rp 9.150.835,00
H, Transportasi dan Pergudangan	Rp 2.115.805,00	Rp 2.196.781,00	Rp 2.448.961,00	Rp 2.755.587,00	Rp 3.239.017,00
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 162.955,00	Rp 168.179,00	Rp 189.030,00	Rp 214.736,00	Rp 244.941,00
J, Informasi dan Komunikasi	Rp 1.924.698,00	Rp 2.014.964,00	Rp 2.145.092,00	Rp 2.228.026,00	Rp 2.351.904,00
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 2.687.448,00	Rp 2.878.904,00	Rp 3.142.195,00	Rp 3.271.494,00	Rp 3.343.044,00
L, Real Estat	Rp 1.028.332,00	Rp 1.041.287,00	Rp 1.162.775,00	Rp 1.317.714,00	Rp 1.523.344,00
M,N, Jasa Perusahaan	Rp 24.741,00	Rp 21.231,00	Rp 23.248,00	Rp 25.255,00	Rp 27.514,00
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 6.121.327,00	Rp 6.135.253,00	Rp 6.211.553,00	Rp 6.457.489,00	Rp 7.589.124,00
P, Jasa Pendidikan	Rp 7.458.751,00	Rp 7.390.960,00	Rp 7.661.330,00	Rp 8.311.262,00	Rp 8.665.939,00
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 1.144.448,00	Rp 1.270.902,00	Rp 1.299.113,00	Rp 1.476.912,00	Rp 1.576.425,00
R,S,T,U, Jasa lainnya	Rp 1.335.998,00	Rp 1.250.595,00	Rp 1.333.297,00	Rp 1.418.776,00	Rp 1.487.519,00
Total PDRB	36.504.339,30	46.523.908,80	50.355.885,00	54.805.165,00	59.211.877,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Beberapa tantangan yang dihadapi di Kecamatan Kota Atambua antara lain:

- Pasar tradisional yang belum tertata dengan baik.
- Masih banyak UMKM yang kesulitan dalam permodalan dan pemasaran.
- Adanya kegiatan perdagangan lintas batas yang tidak resmi (ilegal) yang bisa merugikan pelaku usaha lokal.

Program Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) diharapkan tidak hanya berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendorong terjadinya transformasi struktural ekonomi di kawasan perbatasan. Melalui pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, serta pengembangan sektor unggulan lokal, program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Dengan demikian, implementasi PKSN diharapkan mampu membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.

4.5 Kondisi Infrastruktur Kota Atambua

Infrastruktur merupakan elemen penting yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan perdagangan, terutama di wilayah perbatasan seperti Kota Atambua. Berdasarkan hasil observasi dan data lapangan, kondisi infrastruktur di Kota Atambua menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala di beberapa sektor.

1. Infrastruktur Transportasi

Kota Atambua memiliki jaringan jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan perbatasan dan daerah *hinterland*. Jalan nasional dan jalan provinsi sebagian besar sudah diaspal dan dalam kondisi baik, terutama jalur dari Atambua menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. Ketersediaan angkutan umum juga masih terbatas, dan masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Terdapat bandara di Kecamatan Atambua yaitu Bandara A. A. Bere Tallo, bandara ini melayani penerbangan.



Gambar 4. 1 Bandar Udara A.A. Bere Tallo



Gambar 4. 2 Jalan Atambua-PLBN Motaain

2. Infrastruktur perdagangan

Terdapat pasar tradisional, toko kelontong, minimarket, dan pusat perdagangan lain yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Pasar tradisional seperti Pasar Baru Atambua menjadi pusat distribusi barang pokok dan hasil pertanian.



Gambar 4. 3 Pasar Baru Atambua



Gambar 4. 4 Pertokoan Atambua

3. Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi

Akses jaringan internet dan telekomunikasi di Kota Atambua sudah tersedia cukup merata, terutama di wilayah perkotaan. Operator

seluler utama sudah menjangkau sebagian besar wilayah, walaupun kualitas sinyal di daerah pinggiran atau perbukitan kadang kurang stabil. Infrastruktur digital ini penting untuk mendukung perdagangan modern dan integrasi data antarwilayah

4. **Infrastruktur Energi dan Air Bersih**

Ketersediaan listrik dari PLN relatif stabil di wilayah kota, namun masih terjadi gangguan pasokan di beberapa titik. Penggunaan genset oleh pelaku usaha masih menjadi alternatif saat terjadi pemadaman. Sementara itu, akses air bersih dari PDAM belum merata ke seluruh wilayah, sehingga sebagian masyarakat mengandalkan sumur gali dan tangki air swasta.

5. **Infrastruktur Sosial**

Fasilitas pendidikan dan kesehatan cukup tersedia, termasuk rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lembaga pelatihan. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan untuk menjawab tantangan pertumbuhan penduduk dan pergerakan masyarakat lintas batas.

4.6 Hasil Wawancara

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual di lapangan serta memperkuat hasil analisis data sekunder, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait dan melakukan survei langsung di Kota Atambua. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi infrastruktur, strategi pengembangan kawasan perbatasan, serta tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan peran Kota Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Instansi yang diwawancarai adalah perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belu, Dinas Perdagangan dan Industri, Badan Pengelola Perbatasan dan masyarakat di Atambua.

Tabel 4. 4 Hasil Wawancara

No	Sumber	Jawaban
1	Bappeda	Hasil wawancara dengan pihak Bappeda bahwa kondisi infrastruktur Kota Atambua saat ini baik, terutama yang mendukung aktivitas ekonomi perdagangan lintas batas seperti Pos Lintas Batas Negara Motaain, menurut penjelasan pegawai dari Bappeda akan ada rencana pembangunan rumah sakit internasional, bendungan We Likis untuk memenuhi kebutuhan air minum, perluasan atau perpanjangan <i>run way</i> bandar udara A.A. Bere Tallo agar dapat melayani pesawat dengan kapasitas yang lebih besar, dan juga peningkatan pembangunan pelabuhan di Atappupu sebagai jalur distribusi barang dan dukungan untuk

No	Sumber	Jawaban
2	Perdagangan dan Perindustrian	<p>perdagangan lintas batas. Kemudian yang menjadi sektor prioritas dalam pengembangan Atambua sebagai PKSN yaitu perdagangan dan jasa. Strategi untuk meningkatkan ekspor produk lokal yaitu. Tantangan utama yang di hadapi yaitu keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Belu dan solusinya yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor seperti perdagangan dan jasa serta pariwisata.</p> <p>Pemerintah daerah Kabupaten Belu melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi dan bea cukai Atambua untuk memperluas jaringan kerja sama dalam bidang perizinan terutama kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau warga pada 2 negara. Sektor industri unggulan yang dikembangkan di Atambua yaitu tenun ikat, kuliner berupa kripik ubi dan kripik pisang, dan pakan ternak ayam dalam proses uji coba. Strategi pemerintah dalam menarik investor yaitu melakukan kerjasama dengan membuat MOU, melakukan sosialisasi tentang bahan baku atau produk yang berada di Kabupaten Belu. Tantangan utama dalam pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yaitu kurangnya modal usaha (pribadi), sumber daya alam, sumber daya manusia (kurangnya keterampilan berusaha), dan pemasaran.</p>
3	Pos Lintas Batas Negara Motaain	<p>Sistem pengawasan di PLBN Motaain dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara beberapa instansi, seperti Imigrasi, Bea Cukai, TNI, dan Polri. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan sistem <i>IT Border Control</i> dan pemeriksaan fisik. Setiap orang dan barang yang melintas diwajibkan melewati pemeriksaan identitas dan muatan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dari masing-masing lembaga. Imigrasi bertanggung jawab atas pemeriksaan dokumen perjalanan, sementara Bea Cukai memeriksa barang bawaan berdasarkan daftar komoditas yang diperbolehkan dan dilarang. Jika ditemukan pelanggaran, pelintas akan diperiksa lebih lanjut di</p>

No	Sumber	Jawaban
4.	Masyarakat	<p>ruang khusus. Barang yang sering keluar dari Indonesia ke Timor Leste meliputi bahan pangan (beras, minyak goreng, mie instan), bahan bangunan (semen, besi), pakaian jadi, dan alat elektronik. Sementara barang masuk dari Timor Leste relatif sedikit, biasanya berupa hasil kerajinan tangan atau barang-barang kecil lainnya. Kasus penyelundupan barang dan manusia itu terjadi hampir setiap hari dan kemudian akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan. Faktor utama penyebab penyelundupan adalah motif ekonomi (harga barang lebih murah di Indonesia).</p> <p>Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa keberadaan perdagangan lintas batas membawa dampak positif terhadap kehidupan ekonomi mereka. Perdagangan ini menyediakan akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga bersaing, membuka peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak warga yang bekerja sebagai sopir angkut, porter, atau pedagang kecil di pasar sekitar PLBN. Namun, ada pula masyarakat yang menyatakan kekhawatiran terkait stabilitas harga barang di pasar lokal, terutama akibat masuknya barang impor ilegal dengan harga murah yang berdampak pada produk lokal.</p> <p>Masyarakat menyatakan bahwa mereka mendukung aktivitas perdagangan lintas batas karena membawa manfaat ekonomi secara langsung. Mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi seperti koperasi, kelompok tani, dan UMKM. Partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung peran Atambua sebagai PKSN.</p>

Sumber : Hasil Survei 2025

1. Responden

Nama : Maria D. Leto
 Umur : 46
 Pekerjaan : Wiraswata

No	Faktor yang Dinilai	Sangat Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Netral / Cukup Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh
1	Permintaan & Penawaran					√
2	Infrastruktur				√	
3	Sosial & Budaya	√				
4	Jenis Barang				√	
5	Harga Barang					√

Sumber : Hasil Survei 2025

Nama : Marianus Lede
 Umur : 50
 Pekerjaan : PNS

No	Faktor yang Dinilai	Sangat Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Netral / Cukup Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh
1	Permintaan & Penawaran		√			
2	Infrastruktur			√		
3	Sosial & Budaya		√			
4	Jenis Barang		√			
5	Harga Barang					√

Sumber : Hasil Survei 2025

Nama : Eustakia O. Leo
 Umur : 36
 Pekerjaan : PNS

No	Faktor yang Dinilai	Sangat Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Netral / Cukup Berpengaruh	Berpengaruh	Sangat Berpengaruh
1	Permintaan & Penawaran				√	
2	Infrastruktur				√	
3	Sosial & Budaya		√			
4	Jenis Barang				√	
5	Harga Barang					√

Sumber : Hasil Survei 2025

Berdasarkan jawaban responden di atas yang paling berpengaruh dalam faktor perdagangan lintas batas yaitu karena harga dan jenis barang, hal ini akibatkan karena perbedaan nilai mata uang antara Indonesia dan Timor Leste, maka dari itu masyarakat dari Timor Leste lebih tertarik untuk membeli barang dari Indonesia khususnya di Kecamatan Atambua